

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adeb Davega Prasna and Meri Yarni, *Proses Beracara Pengujian Undang-Undang Dan Sengketa Pilkada Di Mahkamah Konstitusi*, ed. Herlambang Djati (Tangerang Selatan, 2025).
- A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2020).
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu pencarian*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009).
- Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, KabuPaten, dan kota dalam rangka otonomi daerah*. (Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 2000).
- Bagir Manan, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2004*, (Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2005).
- Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum*, (Bandung : Mandar Maju., 2008).
- Hidjaz, M. Kamal. *Efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia*. (Pustaka Refleksi, 2010).
- J. Djohansjah. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta, Kesaint Blanc. 2008).
- Jimlly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta, 2006).
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006).
- Jimly Asshiddiqie. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia – Pasca Reformasi*, Penerbit PT. Bhuna Ilmu Populer, (Jakarta, Kelompok Gramedia. 2007).
- M.Marwan dan Jimmy P. , *Kamus Hukum*, (Reality Publisher, Surabaya, 2009).
- Manggalatung, S. *Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim*. (2014).

Meri Yarni, *Mahkamah Konstitusi : Putusan Inkonstitusional Bersyarat*, ed. Windarto and Khofifah Rizki Amanda (Jambi: Salim Media Indonesia, 2023), www.salimmedia.com.

Meri Yarni, *Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Di Indonesia (Suatu Kajian Politik Hukum)*, ed. E Nuriyatman, 1st ed. (Jakarta Selatan: Damera Press, 2023).

Mohamad, Ismail; Rasul, Sjahrudin; Umar, Haryono. *Akuntabilitas: Konsep Dan Pengukuran*. Buku Dosen-2004, 2021.

Mustofa, H. W. S. *Kode Etik Hakim*. (Prenada Media,2013).

Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*. (Universitas Lampung Bandarlampung, 2009).

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. (PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Rajawali Pers, Jakarta,2013).

SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 1997).

Soejono, Abdurrahman, *Metode penelitian hukum*,(Jakarta rineka cipta 2003).

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1989).

JURNAL

Agustine, O. V. Keberlakuan yurisprudensi pada kewenangan pengujian undang-undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, (2018).

Alaya Rihadatul Aisya , Amelia Intan Safitri , Astri Nuraina , Najwa Yustitia Aequo, Tasya Halimah Nia Purwanti , Kuswan Hadji. Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Undang Undang Dasar Dan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Ketua Mahkamah Konstitusi, *ALADALAH : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Volume. 2* (2024).

Bayu Kurnia Nazarrudin Qolyubby , Syofyan Hadi. Pengaturan Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial,Politik dan Hukum* (2024).

- Diah Pudjiastuti Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Independensi Hakim Di Indonesia . *Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis Universitas Wanita Internasional*, Vol. 5 No. 2 (Juli 2023).
- Dr. I Nyoman Suyatna. Hukum Antar Wewenang. *Studi Magister Ilmu Hukum Kekhususan Suprastruktur-Infrastruktur Politik Konsentrasi Hukum Publik*.(2020).
- Elfid Nurfitra Mubarak1, Alwi Al Hadad2 , Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan, *Khazanah Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2021).
- Fahmiron, Fahmiron, et al. Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman. *Litigasi*, Vol 17.2 (2016)
- Firmantoro, Z. A. Menimbang kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020= *Considering the position of Assembly Court in the Republic of Indonesia after the establishment of Law Number 7 in 2020. Jurnal Konstitusi*.(2020).
- Gandara, Moh. Kewenangan atribusi, delegasi dan mandat. *Khazanah Hukum*, (2020).
- Meri Yarni and khofifah rizki Amanda, “Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat Pada Kewenangan Pengujian Formil Undang – Undang Terhadap Undang-Undang Dasar,” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 4 (2024): 636–55, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2146>
- Meri Yarni et al., “Quo Vadis of the Constitutional Court in Resolving Disputes Over Regional Election Results After Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XX/2022,” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 3 (2024): 1–13.
- Kosariza Kosariza, Netty Netty, and Meri Yarni, “Analisis Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi,” *Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (2020).
- Melkianus Umbu Deta , I Nyoman Suandika , Ida Bagus Anggapurana Pidada. Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi), *Student Research Journal Volume. 2 No. 4* (2024).

- Mustopa, Al Amin Syayidin Ali. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia, *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*: Vol. 2: No. 2, Article 4.(2022).
- Nuridahwati, Z. Karakter Final Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Melaksanakan Kewenangan Sesuai Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, (2020).
- Situngkir, D. A. Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum. *Ensiklopedia of Journal*. (2023).
- Sutatiek, S. Akuntabilitas Moral Hakim dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara Agar Putusannya Berkualitas. *Arena Hukum*, (2013).
- TriwulanTutik, T. Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-undang Dasar Negara RI 1945. *Jurnal Dinamika Hukum* (2012).
- Virto Silaban & Kosariza, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2021).
- Zulqarnain, Cantika Dhea Marshanda, Nararya Salsabila Zamri, and Raesa Mahardika. "Analisis pelanggaran kode etik dalam kasus pemberhentian Ketua MK Anwar Usman terkait putusan batas usia capres dan cawapres pada Pemilu 2024." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1.2 (2023): 85-94.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur prinsip independensi hakim serta pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman secara umum.

Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, PMK No. 2 Tahun 2014, Psl 14 ayat (2).

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Meri Yarni, *Politik Hukum Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. S3 Disertasi, Ilmu Hukum Universitas Jambi. (2023).

INTERNET

Abba Gabrillin, "Patrialis Akbar Ditangkap bersama Seorang Perempuan di Grand Indonesia," <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/26/20172511/patrialis.akbar.ditangkap.bersama.seorang.perempuan.di.grand.indonesia>, diakses 3 September 2024.

Anwar Usman Diberhentikan dari Ketua MK karena Pelanggaran Berat. <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/07/18264471/anwar-usman-diberhentikan-dari-ketua-mk-karena-pelanggaran-berat>. Diakses 15 Oktober 2024.

Dewi Oktaviani, Pengertian, Fungsi dan Pembagian Lembaga Negara, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-fungsi-lembaga-negara/#google_vignette, diakses 5 oktober 2024.

Hukum online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/independensi-dan-akuntabilitas-peradilan-harus-sama-sama-diperjuangkan-lt590003b7ba91b/>. diakses pada Selasa 11 maret 2025

Institutional Theory. <https://study.com/academy/lesson/institution-theory-environment-social-structure.html>. Diakses pada 12 maret 2025.

Lia Harahap, "KY miris penangkapan Patrialis bikin profesi hakim kembali tercoreng," <https://www.merdeka.com/peristiwa/ky-miris-penangkapan-patrialis-bikin-profesi-hakim-kembali-tercoreng.html>. diakses 4 September 2024.